

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun sektor tersier. Sedangkan arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai hakekat dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menafsirkan potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Penelitian Hadryan Putra (2010), menyebutkan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberikan harapan bagi daerah untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap

penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan tugas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pada saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada PAD.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan PAD, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dalam pembentukan PAD dan berpotensi untuk dioptimalkan. Prakoso (2005:1) menyebutkan bahwa pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintah daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terutama di daerah kabupaten atau kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain Kota Semarang. Salah satu jenis retribusi daerah yang ada di Kota Semarang adalah Retribusi Pasar. Retribusi Pasar adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penerimaan retribusi pasar dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pedagang yang ada di dalam pasar tersebut. Hal ini dikarenakan retribusi pasar hanya dikenakan kepada para pedagang yang berjualan di dalam pasar tersebut, baik pedagang yang berjualan di kios maupun los. Oleh karena itu, jumlah pedagang di pasar secara langsung akan mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Dengan banyaknya lapangan kerja yang ada maka akan banyak penduduk yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbelanja di pasar. Dengan demikian para pedagang akan mendapatkan keuntungan, sehingga dapat membayar retribusi pasar.

Ekonomi sektor publik adalah hubungan antara publik dengan privat, dimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat demi kepuasan masyarakat. Dalam penelitian ini pemerintah memberikan tempat dan pelayanan kepada para pedagang pasar, dimana para pedagang diwajibkan untuk membayar retribusi yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan

pemerintah kepada masyarakat. Sehingga dengan pelayanan yang lebih baik akan memperbaiki fasilitas pasar dan penerimaan retribusi pasar pun akan meningkat.

1.2 Rumusan Masalah:

1. Apakah pengaruh jumlah pedagang kios terhadap penerimaan retribusi pasar?
2. Apakah pengaruh jumlah pedagang los terhadap penerimaan retribusi pasar?
3. Apakah pengaruh luas pasar terhadap penerimaan retribusi pasar?

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah pedagang kios terhadap penerimaan retribusi pasar,
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah pedagang los terhadap penerimaan retribusi pasar,
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh luas pasar terhadap penerimaan retribusi pasar?

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah:

1. Bagi pemerintah kota Semarang, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang telah disepakati serta pelaksanaannya dilapangan.
2. Bagi pihak universitas, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi nilai tambahan kepastakaan khususnya di program studi ekonomi akuntansi.
3. Bagi penulis, merupakan tambahan pengetahuan secara nyata untuk mengaplikasikan teori yang di dapat di bangku kuliah.

4. Bagi masyarakat, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya pedagang kios dan pedagang los yang berjualan dipasar dapat mengetahui tujuan uang retribusi yang mereka bayarkan kepada Dinas Pasar atau pengelola pasar tempat mereka berjualan.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting supaya inti masalah dan obyek yang diteliti dapat tercapai tanpa dikaburkan oleh masalah yang lain, mengingat ada beberapa faktor (jumlah pedagang, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los, tarif retribusi, jumlah petugas pemungut, luas pasar, dan kelas pasar) yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar tersebut, maka dalam kajian ini penulis hanya akan membatasi pada faktor-faktor yang menonjol yaitu jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan luas pasar yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang penjelasan yang terkandung setiap masing-masing Bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan diuraikan latar belakang yang diusung dalam menyusun skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori tentang uraian dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian dari masalah yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Populasi, Sampel, Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari obyek penelitian serta pembahasan mengenai hasil perhitungan data dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.